

## **BAB VI**

### **KERJASAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH ILLEGAL FISHING**

Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya telah memiliki hubungan diplomatik dalam rentang waktu yang cukup lama. Kedua negara juga terlibat dalam berbagai kerjasama multilateral, baik di dalam forum regional maupun internasional. Sedangkan secara bilateral, kerjasama komprehensif antara kedua negara sangat erat.

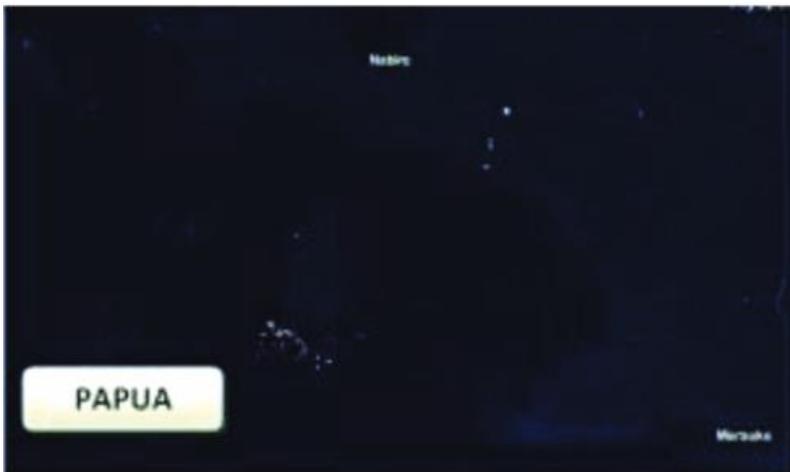
Dengan adanya kebijakan poros maritim dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, pembangunan di bidang maritim akan diterapkan oleh pemerintah. Masih banyak permasalahan-permasalahan umum disektor maritim, untuk itu, pemerintah membutuhkan kerjasama maritim yang dapat membangun serta mengurangi berbagai macam permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Kerjasama maritim Indonesiadengan Amerika Serikat adalah kesepakatan yang tepat oleh Presiden Joko Widodo, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Amerika Serikat tersebut sebagai upaya untuk mencegah permasalahan *Illegal Fishing* yang semakin memburuk dengan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat yaitu dengan pengadaan teknologi dimana Badan Nasional dan Kelautan Atmosferik (NOAA) Amerika bekerjasama dengan kemitraan yang ada di Indonesia untuk meneliti fenomena alam laut seperti gempa, cuaca ekstrem dan fenomena oseanografi lainnya. Selain itu kedua negara bekerjasama perihal kemandirian Kawasan dimana *U.S. Coast Guard* dan Program *Export Control and Related Border Security Program* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai. Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari *US Coast Guard* juga melakukan peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar keamanan kapal dan pelabuhan. (Bakamla, 2015)

## A. Pengadaanteknologi

Pemerintahan dibawah Presiden Jokowi fokus memperhatikan kawasan laut, mengingat Indonesia salah satu negara dengan kepulauan terbesar di Asia dan kedua di dunia, untuk mewujudkan poros maritim dunia Indonesia sepakat bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk memperbaiki Kawasan laut. Pada 24 Oktober 2015, penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang maritim (MoU), menandai dibukanya kerjasama kedua negara Indonesia dan Amerika serikat dalam bidang maritim.(US Embassy Jakarta, 2015)Kerjasama ini diharapkan akan dapat mendukung kepentingan kedua negara, melindungi laut, mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan yang berkelanjutan.

Selain itu pemerintah Indonesia bekerjasama untuk mengurangi *illegal fishing* dengan *United States Agency for International Development* (USAID) besertamasyarakat dan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan USAID. (BMKG, 2016)Untuk menjaga ekosistem laut Indonesia dari kegiatan pencurian ikan yang tidak dilaporkan atau *illegal fishing*, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia berupa pengadaan teknologi fasilitas *alert system* di 86 MPA (*marine protected area*) melalui pemanfaatan data satelitVIIRSuntuk mendeteksi kapal (*VIIRS boat detection*). (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)



**Gambar 4. 1 Potret Kenampakan Pulau Jawa dan Papua di Malam Hari melalui data satelit VIIRS**

Sumber: (LAPAN, 2015)

Teknologi ini membantu para peneliti mempelajari atmosfer, darat, dan laut saat malam hari melalui satelit yang ditunjukkan melalui lampu-lampu kota yang menunjukkan pusat-pusat populasi padat, yang bersumber dari aktivitas manusia di daratan dan lokasi sumberdaya perikanan tangkap yang ditandai dengan aktivitas nelayan melalui lampu-lampu kapal penangkap

ikan yang besar. (Manoppo, 2015) Informasi ini dapat digunakan untuk mengawasi aktivitas kapal penangkap ikan, terutama kapal besar milik nelayan lokal atau nelayan asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan sehingga penggunaan data satelit VIIRS dapat membantu dalam memerangi permasalahan illegal fishing di Indonesia.

*Oceans and Fisheries Partnership* (USAID Oceans) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menjalin mitra kerjasama dalam menurunkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti peraturan (IUU). Melalui kemitraan ini, USAID dan MDPI mengembangkan sistem yang inovatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Sistem tersebut adalah CDT *Catch Documentation and Traceability* (CDT) merupakan sebuah alat elektronik yang dapat memantau rantai makanan habitat laut, dapat mengumpulkan dan melakukan validasi data utama produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakannya, dari tempat penangkapannya hingga sampai ke konsumen akhir. (Kurniawan, 2016) Selain itu sistem CDT membantu Pemerintah Indonesia memenuhi standar rantai pasokan yang etis dan adil sesuai mandat *U.S. Seafood Import Monitoring Program* yang baru diterapkan dan menurunkan penangkapan ikan IUU di perairan Indonesia. (U.S. Embassy Jakarta, 2017) Sistem dokumentasi yang disebut sebagai CDT itu akan terintegrasi dengan sistem yang telah ada di pemerintahan, dan akan memasukkan elemen data kesejahteraan manusia. Program ini diterapkan dengan mengacu kepada kerangka pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem.

Badan Nasional dan Kelautan Atmosferik (NOAA) Amerika bekerja sama dengan mitra-nya Indonesia dengan melakukan observasi dan penelitian bersama terkait ekosistem laut, termasuk penelitian oseanografi serta keragaman perubahan iklim. Indonesia dan Amerika Serikat kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan melakukan observasi dan penelitian bersama terkait ekosistem laut. Untuk mengatasi masalah-masalah terkait ekosistem laut dan oseanografi di Indonesia, Amerika memberikan bantuan dalam bentuk penelitian bersama serta pengadaan teknologi untuk

membantu Indonesia mengurangi dampak pencurian ikan dan bencana alam. (LIPI, 2017) Kerjasama ini akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut dan atmosfer serta kemampuan untuk memprediksi respon perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Amerika Serikat dan Indonesia akan dapat memperkirakan kekeringan dan curah hujan yang abnormal untuk wilayah di Indonesia, memahami bagaimana fenomena oseanografi di Samudra Hindia mempengaruhi Amerika Serikat, serta memahami dampak ekologis pengasaman air laut pada terumbu karang. (U.S. Embassy Jakarta, 2017)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Badan Nasional dan Kelautan Atmosferik (NOAA) Amerika. Kerjasama antara BMKG dan NOAA fokus terhadap fenomena iklim yang terjadi di wilayah Indonesia maupun Samudera Hindia. Dalam mengatasi masalah oseanografi yang terjadi di Indonesia serta di Samudera Hindia, NOAA memberikan bantuan untuk Indonesia dalam melakukan riset serta observasi kelautan.

Kegiatan bersama yang dilakukan kedua lembaga negara tersebut adalah Ekspedisi Prima 2017. Kegiatan yang melibatkan LIPI, BMKG, dan NOAA ini, adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti fenomena alam laut seperti gempa, cuaca ekstrem dan fenomena oseanografi lainnya. Fokus utama dari kegiatan Ekspedisi Prima 2017 adalah untuk mengetahui fenomena alam yang terjadi di Samudera Hindia. (LIPI, 2017) Kegiatan yang dinamakan Indonesia Prima ini bertujuan melakukan perawatan dan pembaruan buoy laut atau rambu penuntun juga melakukan pengamatan parameter cuaca/iklim di sekitar Samudera Hindia di sepanjang jalur pelayaran, antara lain: pengukuran profil atmosfer hingga ketinggian puluhan kilometer, perubahan cuaca setiap jamnya, kualitas udara, konsentrasi karbon, komposisi dan sifat fisis laut hingga 7000 meter. *Nasional Ocean and Atmospheric Administration (NOAA)*, Indonesia melakukan pelayaran selama 30 hari mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 17 Maret 2016. Kegiatan pelayaran ini dilaksanakan dua sesi, yaitu: (Jakarta-Banda Aceh dan Banda Aceh-Jakarta). Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perawatan terhadap *Research Moored Array for African-Asian-Australian*

*Monsoon Analysis and Prediction* yang ada di samudera Hindia. (BMKG, 2016) Perawatan ini dilakukan untuk mendukung tersedianya data observasi laut yang berlanjut, selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung peningkatan informasi cuaca dan oseanografi.

Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam menciptakan teknologi dan mengembangkan wilayah maritim memberikan banyak manfaat untuk jalannya kebijakan poros maritim dunia. Seperti yang dilakukan *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)* Amerika dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

## **B. Keamanan Kawasan**

Indonesia dan Amerika Serikat bekerjasama dalam keamanan kawasan, kedua negara tersebut memperhatikan mengenai keamanan pelabuhan. Kualitas infrastruktur semakin penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau, di mana transportasi antara satu pulau dengan pulau lainnya menjadi hal yang sangat penting. Kondisi infrastruktur pelabuhan Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan yang mendesak, ketersediaan infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih dianggap kurang. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Arus barang ekspor dan impor maupun antar pulau menjadi terhambat dan biaya logistik semakin membengkak. (Kemenperin, 2014)

Kedua negara menginginkan keamanan pelabuhan yang sesuai dengan standar internasional sehingga dapat mencegah ancaman keamanan maritim. Pada tahun 2014, Penjaga Keamanan Pantai AS atau *U.S. Coast Guard* dengan Program *Export Control and Related Border Security Program (EXBS)* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai Indonesia, 24 petugas KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Indonesia menyelesaikan pelatihan *Boarding Officer Course* selama 2 minggu dibawah bimbingan empat instruktur dari *U.S. Coast Guard*. (US Embassy, 2014) Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam mengukur stok ikan

dan mengembangkan strategi pemanfaatan perikanan serta peran mereka dalam pengembangan rencana pengelolaan perikanan. Tak hanya itu, pelatihan tersebut juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya evaluasi data dan proses mengkaji data sebagai bagian dari proses monitoring. Keahlian tersebut berperan penting dalam perbaikan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Selain Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari *US Coast Guard* berguna untuk melakukan peningkatan kapasitas memenuhi standar Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional (*International Ship and Port Security*). Amerika Serikat melalui Program EXBS memberikan sejumlah peralatan keamanan di pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diantaranya berupa radio komunikasi, CCTV, generator, komputer, tiang lampu dan *vehicle inspection mirror* dengan total nilai US \$1.020.000. (Dephub, 2012) Fasilitas Pelabuhan di Indonesia sampai akhir 2017 yang sudah 'comply' berjumlah 348 fasilitas pelabuhan, fasilitas pelabuhan di Indonesia secara penuh telah mengimplementasikan *The International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code. ISPS Code merupakan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea - SOLAS) (Dephub, 2018) Oleh karena itu selain mendapatkan bantuan peralatan, Indonesia juga akan mendapatkan bantuan pelatihan SDM. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara serta mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut, terutama untuk barang-barang yang dikirim antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Keamanan maritim menjadi salah satu faktor penting mengingat semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Isu keamanan maritim penting karena banyak aktivitas dunia yang dihubungkan via laut, bahkan 90% perdagangan dunia didukung oleh lalu lintas laut sebagai perantara. Ancaman tersebut bisa berupa penyeludupan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, dan sebagainya.

Menurut *The United Nations Secretary General* tidak mendefinisikan *Maritime Security* secara detail, akan tetapi dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea* pada tahun

2008 menyebutkan beberapa indikasi yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terhadap *Maritime Security*, antara lain:(Natalie Klein, 2011)

1. *Piracy dan Armed Roberry*, kejahatan laut yang membahayakan keselamatan para pelaut serta keamanan jalur navigasi dan komersil.
2. *Terrorist acts*, yang mengancam kapal, offshore installations dan kegiatan maritime lainnya yang *berdampak* pada terganggunyakeadaan ekonomi negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.
3. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*.
4. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psycotropic substance*, yang menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagangan obat-obatanbaik selama maupun setelah pelayaran.
5. *Smuggling dan trafficking of persons* melalui laut dengan menggunakankapal yang tidak layak guna dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
6. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, diidentifikasi padaskala *food security* yang mengancamterhadap kestabilan hubungan internasional dan keamanan laut. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadap lingkunganmaritimesebagai suatu isu penting bagi potensi sumber daya laut yang mengancamkeamanan suatu negara maupun negara banyak yang mempengaruhi hubungan kepentingan sosial, dan ekonominegara pantai.

Kejahatan laut di Asia Tenggara saat ini tidak hanya masalah pertahanan dalam dimensi militer, akan tetapi mengarah pada dimensi lain, seperti: *illegal fishing, smuggling of goods and people, fraud, dan piracy*.(Liss, 2007)*Illegal fishing* di perairan Indonesia merupakan isu yang menjadiperhatian keamanan nasional dan menjadi permasalahan antara pelaku aktifitas illegal fishing yang didominasi oleh kapal berbendera asing dengan instansi pemerintah Indonesia yang berakibat pada permasalahan hubungan dengan negara lain.

Amerika Serikat sebagai rekan kerjasama maritim Indonesia, memberikan rekomendasi untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang belum dapat pemerintah

Indonesia selesai dengan baik dalam hal keamanan laut. Program-program yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat dalam hal keamanan maritim adalah *Export Control and Related Border Security Program* (EXBS - Pengawasan Ekspor dan Keamanan Perbatasan) dan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS Code) mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi maritim. Beberapa kali Amerika Serikat melakukan kunjungan untuk memantau kondisi pelabuhan di Indonesia begitu juga dengan delegasi Indonesia yang melakukan kunjungan kerja ke *USCG HeadQuarter, Training Center*, dan *Academy* pada tanggal 31 Agustus s.d. 4 September 2015 di Amerika Serikat. (Bakamla, 2015)